

Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah melalui Pendampingan Penyusunan Renstra dan Renja Kabupaten Sigi

Mohammad Ahlis¹, Yunus Sading², Muhtar Lutfi³, Eko Jokolelono⁴, Andi Darmawati Tombolotutu⁵, Nurnaningsih⁶, Ika Rafika^{7*}, Nurfadilah Sindika Sari⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Tadulako, Kota Palu, Indonesia

*e-mail korespondensi: ikarafika709@gmail.com

Abstract

Strengthening the capacity of regional apparatus is an important prerequisite for improving the quality of development planning through the Strategic Plan (Renstra) and Work Plan (Renja) documents. In Sigi Regency, the preparation of planning documents still faces obstacles in the form of weak coordination across OPDs, sectoral egos, the lack of integration of SIPD and SIKD, and the low understanding of the apparatus towards performance-based planning. This service activity aims to strengthen the capacity of regional apparatus in the preparation of the 2025-2029 Strategic Plan and the 2025 Strategic Plan through integrated and collaborative technical assistance. The assistance will be carried out for six months in 2024 with a collaborative, participatory, and applicative approach through the stages of identifying needs, preparing materials, online and offline technical assistance, as well as evaluating and harmonizing documents. The offline activity took place on August 3, 2024 at BAPPELITBANGDA Sigi Regency using the Pumped Group Discussion method and involving strategic OPDs, including BPKAD, the Regional Revenue Agency, the Environment Office, and OPDs for women's and population affairs. The results of the activity showed an increase in the understanding of the apparatus on the interconnectedness of planning documents, strengthening the ability to formulate programs and performance indicators, and increasing coordination across OPDs so that the Strategic Plan and Renja documents were more aligned, realistic, and results-oriented.

Keywords: Capacity building; Renstra; Renja; Technical Assistance; OPD coordination

Abstrak

Penguatan kapasitas perangkat daerah menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Di Kabupaten Sigi, penyusunan dokumen perencanaan masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi lintas OPD, ego sektoral, belum terintegrasinya SIPD dan SIKD, serta rendahnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan berbasis kinerja. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kapasitas perangkat daerah dalam penyusunan Renstra Tahun 2025–2029 dan Renja Tahun 2025 melalui pendampingan teknis yang terintegrasi dan kolaboratif. Pendampingan dilaksanakan selama enam bulan pada tahun 2024 dengan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan aplikatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, penyusunan materi, pendampingan teknis daring dan luring, serta evaluasi dan penyesuaian dokumen. Kegiatan luring berlangsung di BAPPELITBANGDA Kabupaten Sigi menggunakan metode Diskusi Kelompok Terpumpun dan melibatkan OPD strategis, termasuk BPKAD, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, serta OPD urusan perempuan dan kependudukan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur terhadap keterkaitan dokumen perencanaan, penguatan kemampuan merumuskan program dan indikator kinerja, serta meningkatnya koordinasi lintas OPD sehingga dokumen Renstra dan Renja lebih selaras, realistis, dan berorientasi hasil.

Kata Kunci: Penguatan Kapasitas; Renstra; Renja; Pendampingan Teknis; Koordinasi OPD

Accepted: 2025-12-26

Published: 2026-04-04

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memiliki peran kunci

sebagai penghubung antara visi pembangunan jangka menengah dengan implementasi tahunan program dan kegiatan. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, dokumen perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana koordinasi, integrasi kebijakan, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan yang kompleks dan dinamis (Kikuchi, 2023; You, 2022). Perencanaan yang baik terbukti mampu meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, menyelaraskan kebijakan lintas sektor, serta mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Dangerfield et al., 2024).

Namun demikian, praktik penyusunan dokumen perencanaan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai permasalahan struktural dan kapasitas, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah. Permasalahan utama yang ditemukan di lokasi pengabdian adalah lemahnya koordinasi antar perangkat daerah yang seharusnya dimediasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Koordinasi sering kali bersifat simbolik dan informal, tanpa menghasilkan integrasi kebijakan yang substansial. Selain itu, integrasi sistem perencanaan dan penganggaran belum terbangun secara sistemik, ditandai dengan belum terintegrasinya Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam pola kerja aparatur sipil negara. Kondisi ini memperkuat fragmentasi kerja antar perangkat daerah, di mana kolaborasi masih terbatas pada "sama-sama bekerja" alih-alih "bekerja bersama" dalam kerangka sistem pembangunan yang terpadu. Fenomena ini sejalan dengan temuan (Glaas et al., 2022) dan (Adom et al., 2023) yang menegaskan bahwa lemahnya koordinasi kebijakan dan berbagi pengetahuan menjadi penghambat utama dalam penguatan kapasitas pemerintahan lokal.

Permasalahan semakin kompleks dengan masih kuatnya ego sektoral antar perangkat daerah yang menyebabkan sinkronisasi perencanaan tidak berjalan optimal. Perencanaan pembangunan sering kali terputus pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga Renstra dan Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya bersifat implementatif dan responsif terhadap isu strategis daerah, seperti sensitivitas terhadap bencana pascagempa 28 September 2018 dan penanganan pandemi COVID-19. Kondisi ini mencerminkan lemahnya harmonisasi antara regulasi pusat dan implementasi di daerah, yang pada akhirnya memicu perdebatan non-substantif dalam proses pembahasan perencanaan dan penganggaran, terutama terkait besaran anggaran program dan kegiatan yang tidak selalu rasional. Padahal, berbagai studi menegaskan bahwa harmonisasi kebijakan dan kolaborasi lintas aktor merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan kapasitas institusional dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam situasi krisis dan pascakrisis (ÇELİKİYAY & BAYRAKTAR, 2022; Dimitrijevska-Markoski et al., 2024).

Selain itu, paradigma perencanaan berbasis kinerja seperti *Money Follow Program*, *Program Follow Result*, dan *Money Follow Talent* belum dipahami secara holistik oleh perencana di berbagai perangkat daerah. Akibatnya, alokasi anggaran masih cenderung berorientasi pada pembagian sumber daya, bukan pada pencapaian misi pembangunan dan hasil yang terukur. Padahal, penguatan kapasitas aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan paradigma tersebut sangat krusial untuk mendorong perencanaan yang lebih strategis, adaptif, dan berorientasi hasil (Fernández-i-Marín et al., 2023; Nurdin & Baharuddin, 2023). Keterbatasan kapasitas ini diperparah oleh minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses perencanaan, meskipun transformasi digital telah diakui sebagai salah satu pendorong utama peningkatan kapasitas sektor publik dan efektivitas tata kelola pemerintahan (Atobishi et al., 2024; Nwozor et al., 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Pendampingan penyusunan Renstra dan Renja dipandang sebagai pendekatan strategis untuk memperkuat kapasitas aparatur perangkat daerah melalui proses kolaboratif, partisipatif, dan aplikatif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan

kolaboratif antara akademisi dan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat penggunaan bukti dalam pengambilan keputusan, serta membangun kapasitas kelembagaan yang lebih responsif terhadap tantangan pembangunan (McGee et al., 2022; Morgan et al., 2023; O'Halloran et al., 2022). Pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran bersama yang mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memperkuat kapasitas Perangkat Daerah Kabupaten Sigi dalam penyusunan dokumen Renstra dan Renja melalui pendampingan teknis yang terintegrasi dan kolaboratif. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap perencanaan berbasis kinerja, mendorong koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah, serta menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih selaras, implementatif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. Dengan demikian, pendampingan ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan teknis penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 selama enam bulan pada Tahun 2024. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan aplikatif, yang menekankan kerja bersama antara tim pendamping dan aparatur perangkat daerah, keterlibatan aktif peserta, serta praktik langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan. Pendekatan ini dipilih karena *technical assistance* terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam konteks desentralisasi dan kompleksitas tata kelola pemerintahan lokal (Bou-Orm et al., 2023; Kate, 2023).

1. Tahap pertama adalah identifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra, yang dilakukan melalui diskusi awal dan penelaahan dokumen perencanaan, termasuk data Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKD). Tahap ini bertujuan untuk memetakan kendala teknis, tingkat pemahaman aparatur, serta kebutuhan pendampingan yang spesifik dalam penyusunan Renstra dan Renja. Identifikasi kebutuhan yang kontekstual menjadi penting karena variasi kapasitas analitis dan operasional pemerintah daerah sangat memengaruhi kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan (Abdi, 2024; Setiawan et al., 2022).
2. Tahap kedua adalah penyusunan materi pendampingan, yang dirancang berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan mitra. Materi mencakup penjelasan indikator kinerja, penyusunan master schedule, serta panduan teknis penyusunan setiap bab Renstra dan Renja. Materi disusun bersifat aplikatif agar dapat langsung digunakan oleh perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen, sejalan dengan temuan bahwa penguatan kapasitas sektor publik membutuhkan dukungan teknis yang terstruktur dan relevan dengan kebutuhan kerja (Abdelmoteleb & Nohuddin, 2023; Shava & Doorgapersad, 2022).
3. Tahap ketiga adalah pelaksanaan pendampingan teknis, yang dilakukan melalui kombinasi kegiatan daring dan luring. Kegiatan ini meliputi sosialisasi dan penjelasan teknis penyusunan Renstra dan Renja, pendampingan langsung dalam proses penyusunan dokumen, diskusi dan konsultasi untuk pemecahan permasalahan teknis, serta *review* sementara terhadap draft Renstra dan Renja. Pola pendampingan ini mengadopsi pendekatan mentoring yang menekankan kejelasan tujuan, umpan balik berkelanjutan, dan pembelajaran berbasis praktik, yang terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja organisasi (Cutillas et al., 2023; Steber et al., 2023).
4. Tahap terakhir adalah evaluasi dan penyempurnaan dokumen Renstra dan Renja, yang dilakukan melalui evaluasi bersama terhadap draft akhir dokumen. Evaluasi digunakan sebagai dasar pemberian masukan dan rekomendasi perbaikan, yang selanjutnya diintegrasikan dalam

penyempurnaan dokumen agar lebih selaras, terukur, dan siap diimplementasikan. Evaluasi kolaboratif ini penting untuk membangun rasa kepemilikan dan meningkatkan kualitas keputusan perencanaan, sebagaimana ditekankan dalam literatur mengenai pendekatan partisipatif dan konsultatif dalam perencanaan pembangunan (Mordzeh-Ekpampo, 2025; Sebunya & Gichuki, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara luring pada tanggal 3 Agustus 2024 bertempat di Balai Pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Sigi. Kegiatan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi. Keterlibatan lintas OPD tersebut menjadi prasyarat penting untuk memperkuat koordinasi dan memperkecil fragmentasi perencanaan, mengingat berbagai kajian menyebutkan bahwa penguatan kapasitas pemerintah daerah akan lebih efektif jika melibatkan kerja lintas unit, kolaborasi, dan keterpaduan pengambilan keputusan (Cooper et al., 2023; Rensburg et al., 2024).

1. Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan pengabdian menggunakan metode Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) untuk mendorong partisipasi aktif peserta dan membangun pemahaman bersama tentang kebijakan dan teknis perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Sigi yang menekankan pentingnya keselarasan dokumen perencanaan, terutama dalam periode transisi perencanaan yang membutuhkan integrasi antara dokumen RPD, Renstra, dan Renja. Pendekatan diskusi terfokus ini sejalan dengan prinsip bahwa keterlibatan stakeholder dan forum konsultatif meningkatkan rasa memiliki dan legitimasi dokumen perencanaan, serta mendorong keluaran perencanaan yang lebih realistis dan responsif (Quilling et al., 2022). Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian ini disusun dalam tiga tahapan pendampingan penyusunan Renstra dan Renja OPD Kabupaten Sigi, yaitu sosialisasi awal, pendampingan teknis penyusunan, dan evaluasi serta penyelarasan dokumen. Pendekatan bertahap ini relevan dengan konsep *multilevel capacity building* yang menekankan bahwa penguatan kapasitas tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga pada level kelompok dan organisasi melalui proses pembelajaran kolektif dan praktik bersama (Echeverri et al., 2024; Rensburg et al., 2024).

a. Tahap 1: Sosialisasi Awal

Tahapan pertama berupa sosialisasi awal bertujuan membangun pemahaman konseptual dan kebijakan terkait penyusunan Renstra dan Renja. Pada tahapan ini, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai kerangka regulasi perencanaan pembangunan daerah, keterkaitan antar dokumen perencanaan dari RPJPD, RPJMD/RPD, hingga Renstra dan Renja OPD, serta penjelasan struktur, sistematika, dan indikator kinerja yang harus dipenuhi agar dokumen yang disusun tetap selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sigi. Tahapan ini penting karena salah satu luaran utama kegiatan penguatan kapasitas adalah meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kepercayaan diri peserta dalam menjalankan peran teknisnya. Peningkatan tersebut sejalan dengan temuan bahwa program *capacity building* mendorong peningkatan *self-efficacy* dan kapasitas profesional peserta, sehingga lebih mampu mengimplementasikan praktik perencanaan dan program secara efektif (Echeverri et al., 2024; Juckett et al., 2022).



Gambar 1. Sosialisasi Awal

b. Tahap 2: Pendampingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja

Tahapan kedua merupakan inti kegiatan, yaitu pendampingan teknis penyusunan Renstra dan Renja yang dilakukan secara intensif melalui diskusi terfokus dan konsultasi teknis. Pada tahap ini, tim pengabdian mendampingi OPD dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja perangkat daerah. Pendampingan ini bertujuan memastikan Renstra dan Renja OPD tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga menjawab isu strategis daerah, selaras dengan RPD Kabupaten Sigi, serta disusun secara terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Pendampingan teknis ini relevan dengan *literatur technical assistance* yang menegaskan bahwa dukungan teknis yang terarah dapat meningkatkan kesiapan organisasi, memperkuat kemampuan implementasi, dan meningkatkan mutu keluaran program ketika prosesnya berbasis kebutuhan nyata dan dilakukan secara kolaboratif (Gayles et al., 2024; Megersa, 2022). Selain itu, pendampingan tidak bersifat satu arah, melainkan membangun ruang pembelajaran bersama melalui umpan balik dan penyesuaian berulang, sesuai dengan rekomendasi bahwa *technical assistance* yang efektif perlu dilengkapi proses monitoring, evaluasi, dan adaptasi agar benar-benar sesuai kebutuhan penerima (Hong & Minikin, 2024; Scott et al., 2022). Dengan demikian, pendampingan ini tidak hanya membangun dokumen, tetapi sekaligus membangun kapasitas perencana OPD dalam menyusun perencanaan berbasis indikator dan hasil.



Gambar 2. Pendampingan Teknis Penyusunan Renstra dan Renja

c. Tahap 3: Evaluasi dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan

Tahap ketiga difokuskan pada evaluasi dan penyelarasan dokumen, khususnya untuk menilai kinerja pembangunan daerah melalui evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPd yang masa berlakunya berakhir pada tahun 2023. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan skala makro berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Sigi, dengan metode *trend analysis* untuk membaca perkembangan data antarwaktu dan kecenderungan perubahan indikator

pembangunan. Evaluasi kinerja dokumen perencanaan dilakukan secara terukur dengan mengacu pada indikator yang ditetapkan sesuai Permendagri Nomor 9 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2020.

Tahap evaluasi ini merupakan bagian penting dari penguatan kapasitas kelembagaan karena literatur menekankan bahwa dampak *capacity building* yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh keberadaan sistem evaluasi dan pembelajaran organisasi, sehingga hasil pendampingan tidak berhenti pada dokumen, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan berikutnya (GAKOMEYE & Njenga, 2023; Tobin et al., 2022). Selain itu, pendekatan evaluatif juga mendukung perencanaan berbasis kinerja karena mendorong penggunaan data dan indikator sebagai basis perumusan strategi serta memperkuat akuntabilitas kinerja perangkat daerah (Faozen & Sandy, 2024; Hai-na et al., 2023). Dengan adanya evaluasi ini, perangkat daerah memperoleh kerangka refleksi yang lebih objektif untuk menilai capaian pembangunan, mengidentifikasi indikator yang stagnan atau menurun, dan merumuskan penyesuaian prioritas pembangunan.

2. Dampak Pendampingan terhadap Penguatan Kapasitas OPD

Pendekatan bertahap dalam pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas perencana di lingkungan OPD Kabupaten Sigi. Tahap sosialisasi meningkatkan pemahaman aparatur terhadap arah kebijakan pembangunan, keterkaitan antar dokumen, serta konsistensi indikator kinerja. Tahap pendampingan teknis mendorong penerapan langsung prinsip perencanaan berbasis data, sehingga OPD lebih mampu menyusun Renstra dan Renja yang realistis, terarah, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah serta kemampuan fiskal. Dampak peningkatan kompetensi seperti ini merupakan karakteristik utama *capacity building* yang efektif, yaitu mendorong peningkatan kapasitas individu sekaligus memperkuat kapasitas organisasi melalui praktik bersama (Echeverri et al., 2024; Rensburg et al., 2024).

Keterlibatan lintas OPD dalam kegiatan juga menciptakan ruang koordinasi dan pembelajaran kolektif, yang menjadi faktor penting dalam memperkuat kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap hasil perencanaan. Literatur menunjukkan bahwa pelibatan stakeholder dalam program penguatan kapasitas meningkatkan kualitas hasil, membangun relasi yang autentik, serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap proses dan keluaran program (Cooper et al., 2023; Quilling et al., 2022). Oleh karena itu, pendampingan ini tidak sekadar menghasilkan dokumen, tetapi mendorong perubahan pada cara kerja perencanaan agar lebih kolaboratif dan berbasis indikator.

3. Kontribusi terhadap Tata Kelola Perencanaan Daerah dan Keberlanjutan

Secara jangka panjang, hasil kegiatan ini diharapkan memperkuat tata kelola perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sigi. Dokumen Renstra dan Renja OPD yang tersusun dengan baik menjadi instrumen penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan lintas periode serta meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Selain itu, evaluasi dan penyelarasan dokumen pada tahap akhir menjadi fondasi untuk penyusunan rekomendasi kebijakan terhadap isu strategis daerah pada periode RPJPD, RPJMD, dan RKPD selanjutnya. Hal ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa keberlanjutan program *capacity building* ditentukan oleh penguatan sistem pembelajaran organisasi dan integrasi evaluasi sebagai praktik rutin, sehingga dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang (Culhane et al., 2024; Rojas, 2024; Tobin et al., 2022).

Dengan demikian, kegiatan pendampingan penyusunan Renstra dan Renja OPD Kabupaten Sigi tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan daerah melalui peningkatan kapasitas perencana, penguatan koordinasi lintas OPD, serta penguatan proses evaluasi berbasis indikator yang mendukung perencanaan pembangunan yang lebih adaptif dan berorientasi hasil.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan teknis penyusunan Renstra 2025–2029 dan Renja 2025 OPD Kabupaten Sigi dilaksanakan untuk menjawab permasalahan perencanaan daerah, seperti lemahnya koordinasi lintas OPD, kuatnya ego sektoral, serta belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran. Pendampingan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, partisipatif, dan aplikatif melalui tahapan sosialisasi awal, pendampingan teknis penyusunan, serta evaluasi dan penyesuaian dokumen.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas aparatur OPD dalam memahami regulasi, menyusun perencanaan berbasis indikator dan hasil, serta menghasilkan dokumen Renstra dan Renja yang lebih selaras, terukur, dan implementatif. Selain itu, keterlibatan lintas OPD mendorong ruang koordinasi dan pembelajaran kolektif, sehingga memperkuat tata kelola perencanaan daerah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelmoteleb, A. A. S., & Nohuddin, P. N. E. (2023). *Innovation and Digital Transformation in UAE Public Services: Reactive to Proactive*. 132, 38–54. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.02.4>
- Abdi, H. H. (2024). Civil Service Reform and Public Service Delivery in Somaliland. *South Florida Journal of Development*, 5(4), e3824. <https://doi.org/10.46932/sfjdv5n4-010>
- Adom, R. K., Simatele, M. D., Das, D. K., Mukalazi, K. A., Sonwabo, M., Mudau, L., Sithole, M., Kubanza, N. S., Vogel, C., & Zhou, L. (2023). Enhancing Climate Change Adaptation Governance Through Transforming Institutions in Kwa-Zulu Natal Province, South Africa. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 16(4), 413–438. <https://doi.org/10.1108/ijccsm-12-2022-0157>
- Atobishi, T., Bakir, S. M. A., & Nosratabadi, S. (2024). How Do Digital Capabilities Affect Organizational Performance in the Public Sector? The Mediating Role of the Organizational Agility. *Administrative Sciences*, 14(2), 37. <https://doi.org/10.3390/admsci14020037>
- Bou-Orm, I. R., Loffreda, G., Diaconu, K., Witter, S., & Vos, P. D. (2023). Political Economy of Non-Communicable Disease (NCD) Prevention and Control in Lebanon: Identifying Challenges and Opportunities for Policy Change and Care Provision Reforms. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-17357-1>
- ÇELİKİYAY, H. H., & BAYRAKTAR, H. K. (2022). Local Policies in the Fight Against the Covid-19 Pandemic: Ankara and Rome Municipal Councils' Decisions. *Central European Public Administration Review*, 20(1), 103–134. <https://doi.org/10.17573/cepar.2022.1.05>
- Cooper, C., Watson, K. S., Alvarado, F., Carroll, A. J., Carson, S. L., Donenberg, G. R., Ferdinand, K. C., Islam, N., Johnson, R., Laurent, J., Matthews, A. K., McFarlane, A., Mills, S. D., Vu, M. B., Washington, I., Yuan, C. T., & Davis, P. (2023). Community Engagement in Implementation Science: The Impact of Community Engagement Activities in the DECIPHeR Alliance. *Ethnicity & Disease, DECIPHeR(Special Issue)*, 52–59. <https://doi.org/10.18865/ed.decipher.52>
- Culhane, F., Cheung, V., & Austen, M. C. (2024). Enabling Interdisciplinary Research Capacity for Sustainable Development: Self-Evaluation of the Blue Communities Project in the UK and Southeast Asia. *Ucl Open Environment*. <https://doi.org/10.14324/111.444/ucloe.1970>
- Cutillas, A. L., Benolirao, E., Camasura, J., Golbin, R. A., Yamagishi, K., & Ocampo, L. (2023). Does Mentoring Directly Improve Students' Research Skills? Examining the Role of Information Literacy and Competency Development. *Education Sciences*, 13(7), 694. <https://doi.org/10.3390/educsci13070694>

- Dangerfield, F., Ball, K., Dickson-Swift, V., & Thornton, L. (2024). Planning Healthy Food Environments: An Analysis of Local Government Municipal Public Health and Wellbeing Policy in Regional <sc>Victoria</sc>. *Health Promotion Journal of Australia*, 36(1). <https://doi.org/10.1002/hpja.898>
- Dimitrijevska-Markoski, T., Nukpezah, J. A., & Azhar, A. (2024). Service Delivery During Crises: The Effects of Organizational Capacity, Collaboration, and Public Service Motivation on Organizational Resilience. *Public Administration Quarterly*, 48(4), 210–227. <https://doi.org/10.1177/07349149241262596>
- Echeverri, L., Salio, F., Parker, R., Relan, P., Storozhenko, O., Hubloue, I., & Ragazzoni, L. (2024). Applying the Surge Capacity Components for Capacity-Building Purposes in the Context of the EMT Initiative. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(12), 1712. <https://doi.org/10.3390/ijerph21121712>
- Faozen, F., & Sandy, S. R. O. (2024). *Performance Management: A New Approach in Performance Management*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.1002501>
- Fernández-i-Marín, X., Hinterleitner, M., Knill, C., & Steinebach, Y. (2023). Policy Growth, Implementation Capacities, and the Effect on Policy Performance. *Governance*, 37(3), 927–945. <https://doi.org/10.1111/gove.12816>
- GAKOMEYE, C., & Njenga, G. (2023). Monitoring and Evaluation Practices and Sustainability of Education Project in Rwanda; A Case of University of Rwanda-Sweden Program for Research, Higher Education, and Institutional Advancement. *Journal of Entrepreneurship & Project Management*, 7(10), 97–122. <https://doi.org/10.53819/81018102t5249>
- Gayles, J. G., Chilenski, S. M., Barragán, N., Cooper, B. R., Welsh, J. A., & Galinsky, M. (2024). Unpacking Technical Assistance (TA) Strategies Within a State-Level Prevention Support System: A Mixed-Method Study in Determining Types and Amount of TA. *Evaluation & the Health Professions*, 47(2), 204–218. <https://doi.org/10.1177/01632787241248769>
- Glaas, E., Hjerpe, M., Wihlborg, E., & Storbjörk, S. (2022). Disentangling Municipal Capacities for Citizen Participation in Transformative Climate Adaptation. *Environmental Policy and Governance*, 32(3), 179–191. <https://doi.org/10.1002/eet.1982>
- Hai-na, Y., Shang, H., & Liu, H. (2023). The Role and Influencing Factors of Government Performance Evaluation: A Test of Chinese Public Officials' Perceptions in Gaoming District. *Chinese Public Administration Review*, 14(4), 199–223. <https://doi.org/10.1177/15396754231195575>
- Hong, H. J., & Minikin, B. (2024). Voices From the Field: Exploring Practitioners' Experiences and Perceptions of the Voices of Athletes (VOA) in the Pacific Islands. *Frontiers in Sports and Active Living*, 6. <https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1351451>
- Juckett, L., Bunger, A. C., McNett, M., Robinson, M. L., & Tucker, S. (2022). Leveraging Academic Initiatives to Advance Implementation Practice: A Scoping Review of *Capacity building* Interventions. *Implementation Science*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01216-5>
- Kate, M. (2023). Impact of Devolution on Local Governance and Service Delivery in Kenya. *Ijhss*, 1(1), 41–51. <https://doi.org/10.47941/ijhss.1431>
- Kikuchi, M. (2023). Do Senior Public Managers Matter for Local Government Performance? Linkage With Policy Orientation and Networks of Planning and Development Coordinators in Local Governments in the Philippines. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 21(4), 877–902. [https://doi.org/10.4335/21.4.877-902\(2023\)](https://doi.org/10.4335/21.4.877-902(2023))
- McGee, C., Barlow-Pay, M., Vassilev, I., Baird, J., Fenge, L., Chase, D., & Parkes, J. (2022). Supporting and Enabling Health Research in a Local Authority (SERLA): An Exploratory Study. *BMC Public Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13396-2>
- Megersa, K. (2022). *Effectiveness and Value for Money of Technical Assistance Approaches: In-House vs Contracting*. <https://doi.org/10.19088/k4d.2022.135>

- Mordzeh-Ekpampo, M. I. (2025). *Beyond Governmental Urban Town Planning: The Role of Residents in the Community*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-6466607/v1>
- Morgan, M. J., Stratford, E., Harpur, S., Rowbotham, S., & Chamberlain, D. (2023). Inter-municipal Cooperation and Local Government Perspectives on Community Health and Wellbeing. *Australian Journal of Public Administration*, 83(3), 394–414. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12597>
- Nurdin, M., & Baharuddin, T. (2023). *Capacity building* Challenges and Strategies in the Development of New Capital City of Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 221–232. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.221-232>
- Nwozor, A., Ake, M., Oluwakemi, O. J., & Tijesunimi, A. R. (2022). Digital Transformation and the Fight Against Corruption in Nigeria’s Public Sector. *Perspektif*, 11(3), 850–858. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6449>
- O’Halloran, S., Hayward, J., Strugnell, C., Felmingham, T., Poorter, J., Kilpatrick, S., Fraser, P., Needham, C., Rhook, E., Demaio, S., & Allender, S. (2022). Building Capacity for the Use of Systems Science to Support Local Government Public Health Planning: A Case Study of the VicHealth Local Government Partnership in Victoria, Australia. *BMJ Open*, 12(12), e068190. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-068190>
- Quilling, E., Mielenbrink, V., Osterhoff, A., Terhorst, S., Tollmann, P., & Kruse, S. (2022). State of Evidence on Municipal Strategies for Health Promotion and Prevention: A Literature and Database Research (Scoping Review). *BMC Public Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12607-0>
- Rensburg, A. J. v., Hongo, N., Mthethwa, L., Grant, M., Kathree, T., Luvuno, Z., Leung, A. K. C., Bhana, A., Rao, D., & Petersen, I. (2024). A Learning Health Systems Approach to Scaling Up an Evidence-Based Intervention for Integrated Primary Mental Healthcare Case Finding and Referral in South Africa. *BMJ Global Health*, 9(10), e015165. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2024-015165>
- Rojas, F. (2024). *Integrative Methodologies for Evaluating Bidirectional Impacts in University-Community Engagements*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5026619/v1>
- Scott, V. C., Jillani, Z., Malpert, A., Kolodny-Goetz, J., & Wandersman, A. (2022). A Scoping Review of the Evaluation and Effectiveness of Technical Assistance. *Implementation Science Communications*, 3(1). <https://doi.org/10.1186/s43058-022-00314-1>
- Sebunya, J., & Gichuki, A. (2024). The Impact of Participatory Planning on Sustainable Development: A Literature Review. *JSM*, 4(4), 1–9. <https://doi.org/10.70619/vol4iss4pp1-9>
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned From Decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 323. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>
- Shava, E., & Doorgapersad, S. V. (2022). Talent Management: A “Recipe” for Public Service Delivery in the Fourth Industrial Revolution. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 10(8), 138–148. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i8.1504>
- Steber, H. S., Fishler, K. P., & McBrien, S. B. (2023). Characterizing the Research Mentorship Experience of Genetic Counseling Students. *Journal of Genetic Counseling*, 32(6), 1301–1313. <https://doi.org/10.1002/jgc4.1811>
- Tobin, R., Crawford, G., Hallett, J., Maycock, B., & Lobo, R. (2022). Utilizing Causal Loop Diagramming to Explore a Research and Evaluation *Capacity building* Partnership. *Frontiers in Public Health*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.857918>
- You, J. (2022). Connecting Land and Water Planning in Colorado. *Journal of Planning Education and Research*, 44(4), 1970–1987. <https://doi.org/10.1177/0739456x221131240>